



## PUBLIC AFFAIRS CORNER

# Penentu Praktik "Public Affairs"

**D**i dalam berbagai tulisan saya di *PR INDONESIA*, saya menekankan bahwa *public affairs* (PA) tidak berlangsung dalam ruang hampa. *Public affairs* berlangsung di tengah dinamika ekonomi, sosial, dan politik. Dipengaruhi berbagai unsur budaya dan norma. Kali ini, saya ingin membahas praktik *public affairs* di Jerman. Negara yang berdaulat lebih lama dengan pranata-pranata sosial yang lebih berakar. Aspek sosial, politik dan ekonomi di sana lebih mengemuka.

Saya mengambil definisi *public affairs* dari buku *Public Affairs-Management von Großunternehmen* (Pengelolaan Public Affairs Perusahaan-perusahaan Besar). Definisinya adalah: "*Public affairs* adalah fungsi perusahaan yang mengatur hubungan antara perusahaan yang bersangkutan dengan pemangku kepentingannya termasuk pemerintah, parlemen, asosiasi bisnis dan profesi, serikat pekerja, media, LSM dan masyarakat".

Dua institusi yang disebutkan dalam definisi di atas, yaitu asosiasi bisnis dan serikat pekerja, merupakan pemeran utama perekonomian Jerman. Asosiasi

bisnis, khususnya kamar dagang dan industri (Industrie-und Handelskammer/ IHK) bukan saja pranata sosial, tetapi juga lembaga resmi. Keberadaannya sudah ratusan tahun dan diatur oleh undang-undang sejak 1870. Semua perusahaan wajib menjadi anggota IHK. Payung hukum ini menjadi inspirasi KADIN Indonesia sejak 1970-an untuk mendapatkan pengakuan undang-undang. Perjuangan KADIN akhirnya diperoleh melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Di Jerman, fungsi utama kamar dagang dan industri adalah perwakilan dunia usaha. Fungsi yang menonjol lainnya adalah pendidikan kejuruan terkait berbagai aspek dunia usaha, serta sertifikasi profesi. Di tingkat nasional, asosiasi kamar dagang dan industri Jerman bernaung di bawah lembaga bernama *Deutscher Industrie- und Handelskammertag* (DIHK). Lembaga ini mewakili dunia bisnis di tingkat nasional.

DIHK, IHK, dan asosiasi-asosiasi bisnis sektoral sangat berpengaruh dalam dunia bisnis dan perekonomian Jerman. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa dalam definisi *public affairs* di Jerman, "pemerintah" disebutkan sebagai salah satu *stakeholder* bagi perusahaan. Di pihak lain, serikat pekerja di Jerman tidak kalah pentingnya, hanya saja tidak diperkuat undang-undang khusus.

Serikat pekerja di sana diatur secara sektoral. Berperan sebagai cerminan struktur ekonomi negara. Serikat pekerja yang terkuat dan terbesar (dari sisi jumlah

anggota) adalah IG Metall. IG singkatan dari *Industriegewerkschaft* atau serikat pekerja sektor. Jumlah anggota IG Metall sekitar 2,3 juta atau 5 persen dari seluruh karyawan Jerman yang kini berjumlah 45 juta orang. Serikat ini mewakili karyawan di sektor industri logam dan listrik.

## Pekerja, "Stakeholder" Penting

Fungsi utama serikat pekerja adalah menjalankan negosiasi gaji. Menjalankan kondisi-kondisi kerja lain yang tidak diatur dalam undang-undang secara sektoral dan periodik dengan asosiasi pengusaha. Sebagai contoh, IG Metall berhasil memperjuangkan 35 jam kerja seminggu untuk para anggotanya.

Dari contoh-contoh di atas, struktur bisnis dan ekonomi negara dioperasikan melalui serikat pekerja dan asosiasi bisnis sebagai dua mitra yang setara. Peran serikat pekerja yang sangat kuat justru tidak berdampak negatif terhadap ekonomi Jerman. Negara ini terbukti masih tetap terkuat di Eropa dan berdaya saing tinggi di seluruh dunia. Dalam kondisi pandemi, perdagangan luar negeri Jerman hanya berkurang sedikit.

Dalam pemahaman *public affairs* di Jerman, asosiasi bisnis dan serikat pekerja menjadi *stakeholder* yang penting bagi perusahaan, sesuai dengan struktur ekonominya. Lalu, apa yang membedakan pengertian *public affairs* di Jerman dengan di negara lain? Pembedanya adalah pihak-pihak mana yang menjadi pemangku kepentingan perusahaan. Inilah yang membedakan *public affairs* di negara satu dengan lainnya. ●



**Noke Kiroyan**  
Chairman & Chief Consultant  
KIROYAN Partners